

BAB SATU
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Keragamannya

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang bermakna: meskipun memiliki banyak keragaman, namun pada hakekatnya Indonesia tetap merupakan satu kesatuan.

Keragaman dan kesatuan adalah dua ciri yang melekat di dalam eksistensi bangsa Indonesia. Keragaman Indonesia dapat dilihat dari berbagai macam unsur, seperti: suku, bahasa, dialek, budaya, kesenian, agama, aliran kepercayaan, dll. Di sisi lain, kesatuan Indonesia nampak melalui pengakuan dan pernyataan diri yang pernah muncul di dalam sejarah bangsa, yakni dalam deklarasi Sumpah Pemuda, di mana para pemuda yang berasal dari berbagai macam suku dan daerah – sebagai representasi bangsa ini – menyatakan bahwa mereka memiliki satu tanah air yang merupakan tumpah darah mereka, yakni tanah air Indonesia; satu bangsa, yakni bangsa Indonesia; dan satu bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia.

Berdasarkan Sensus Penduduk yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak lebih dari 270 juta jiwa, yang tinggal di pulau-pulau besar dan kecil dalam wilayah geografis Indonesia, dari Sabang

sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, dengan total luas wilayah lebih dari 1,9 juta km², terdiri atas lebih dari 16 ribu pulau, yang terbagi dalam 38 provinsi. Setidaknya ada lebih dari 1.300 suku yang tinggal di dalam wilayah Indonesia,¹ dengan keunikan budaya, adat istiadat, seni, bahasa, dialek, agama, dan sistem kepercayaan.

Keragaman² merupakan realita kehidupan bangsa Indonesia, sebuah kekayaan yang patut disyukuri di hadapan Tuhan. Namun, alih-alih bersyukur, banyak orang justru bersikap sebaliknya, merasa takut pada realita tentang perbedaan. Perbedaan seringkali dianggap sebagai sebuah ancaman. Daripada berurusan dengan perbedaan (diversitas), banyak orang lebih memilih untuk memperjuangkan keseragaman (uniformitas) supaya menjadi sama atau setidaknya mendekati kesamaan dengan diri atau kelompoknya. Perbedaan seringkali direspons dengan sikap *a priori*, sehingga muncullah prasangka (*prejudice*), yang biasanya di bangun atas dasar stereotip tertentu tentang pihak lain. Stereotip akan membentuk sebuah citra (*image*) tentang pihak lain secara negatif, dan bersamaan dengan itu, diikuti dengan sikap memandang diri atau kelompok sendiri dengan lebih positif (lebih baik atau lebih benar). Prasangka sebagai sebuah sikap, akan

1. Data ini merupakan hasil Sensus Penduduk yang diadakan pada tahun 2010, yang diperoleh dari laman website Badan Pusat Statistik, dengan alamat <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html#:~:text=Dalam%20SP2010%20tersedia%201331%20kategori,bahkan%20nama%20sub%20dari%20subsuku>, yang diakses pada tanggal 18 April 2023, pada pukul 10.20 WIB.

2. Yaya Suryana dan H.A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 3. Keragaman atau kemajemukan di dalam masyarakat ditandai dengan terdapatnya berbagai kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang, adat istiadat, budaya, agama, dan kepentingan. Sifat dasar dari masyarakat majemuk dijelaskan dalam empat karakteristik: terjadi segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang berbeda; memiliki struktur sosial yang terbagi dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer; kurang mengembangkan konsensus atau nilai-nilai sosial dasar; sering terjadi konflik dan dominasi politik antara satu kelompok atas kelompok yang lain.

memengaruhi tindakan kita. Dimulai dari ketidakmampuan untuk bertoleransi (intoleran), yang kemudian diikuti dengan ketidaksediaan untuk menerima, menghargai, menghormati pihak lain yang berbeda. Intoleransi berpotensi memunculkan tindakan-tindakan selanjutnya, yakni diskriminasi, memperlakukan pihak lain dengan cara tertentu, yang didasarkan karena adanya karakteristik tertentu yang melekat pada diri mereka. Puncak dari semua ini tidak mustahil terjadi konflik³ dan tindak-tindak kekerasan, baik yang dilakukan melalui kata-kata (kekerasan verbal) berupa memberi julukan tertentu, mengata-ngatai, mempergunjingkan, mengutuk, dll; kekerasan yang dilakukan dengan cara menyakiti, melukai, atau bahkan sampai membunuh (kekerasan fisik); maupun kekerasan yang dilakukan karena legitimasi kekuasaan berdasarkan agama, budaya, politik, dan ekonomi, yang oleh Johan Galtung disebut dengan istilah kekerasan struktural⁴ (*structural violence*), seperti yang terjadi dalam relasi mayoritas-minoritas, atasan-bawahan, kaya-miskin, dll.

Banyak persoalan telah terjadi dalam konteks masyarakat Indonesia yang heterogen. Ketidakmampuan dan ketidakmauan untuk menerima dan menghargai perbedaan, telah memunculkan konflik-konflik sosial⁵ bernuansa SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dan menelan korban dalam jumlah yang besar. Yang

3. Yaya Suryana dan H.A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural*, 6. Konflik, berasal dari istilah *Configere*, yang berarti "saling mengejutkan", dipahami sebagai pertentangan kepentingan oleh pihak-pihak yang berbeda.

4. Johan Galtung, "Violence, Peace and Peace Research," *Journal of Peace Research* 6 (1969): 167-191. Secara sederhana, kekerasan struktural merupakan kekerasan yang dilakukan oleh sebuah struktur politik atau sosial terhadap struktur politik atau sosial lainnya. Lihat, Sondang I.E. Sidabutar et al., *Pemulihan Psikososial Berbasis Komunitas* (Jakarta: KontraS, 2003), 11.

5. Konflik sosial dapat berbentuk: konflik pribadi, konflik kelompok, konflik antarkelas sosial, konflik rasial, konflik politik, dan konflik budaya. Lihat Yaya Suryana dan H.A. Rusdiana, *Pendidikan Multikultural*, 13.

menyedihkan adalah kenyataan semacam ini bukan saja menjadi wajah dari masyarakat Indonesia, tetapi acapkali juga menjadi “wajah” dari kehidupan komunitas orang percaya (gereja) yang berada di tengah-tengah masyarakat multikultur, seperti Indonesia. Padahal Gereja sesungguhnya merupakan komunitas orang percaya yang telah *diperdamaikan* dengan Allah melalui karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus (Rm 5:10). Gereja adalah komunitas orang percaya yang telah diciptakan menjadi *ciptaan baru* di dalam Kristus Yesus (2Kor 5:17; Ef 2:10). Gereja adalah tubuh Kristus, di mana di dalamnya *terdiri dari banyak anggota* dengan tempat dan fungsi yang berlainan, agar saling melengkapi (1Kor 12:14, 18). Namun dalam kenyataannya gereja masih bergumul dan harus terus berjuang untuk benar-benar menjadi ciptaan baru, yang mampu hidup di dalam damai seorang dengan yang lain, khususnya dalam realita kepelbagaian yang ada di dalam tubuhnya dan di sekitarnya. Sesungguhnya, gereja yang satu dan bersatu, itulah yang menjadi kerinduan dan harapan Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja (Yoh 17:11, 21-22).

Etnis Tionghoa dan Gereja Tionghoa di Indonesia

Salah satu bentuk keragaman Indonesia adalah keragaman suku atau etnis. Setidaknya ada 300 kelompok etnik, yang terbagi lagi ke dalam lebih dari 1.300 sub-suku di Indonesia.⁶ Dari sekian banyak jumlah suku di Indonesia, etnis Tionghoa

6. Data diperoleh dari laman web <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>, yang diakses pada tanggal 30 April 2023 pukul 16.39 WIB.

hadir dan menjadi bagian dari bangsa ini. Asal usul etnis Tionghoa di Indonesia dikaitkan dengan kedatangan *Chinese Overseas* atau Tionghoa Perantauan. Mereka datang bermigrasi ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, karena faktor kekacauan, kemiskinan, dan kepadatan penduduk di daratan Tiongkok, tempat asal mereka; serta faktor kolonisasi Barat di wilayah Asia Tenggara yang telah membuka lowongan kerja dan kesempatan baru yang menarik bagi mereka.⁷

Sebagai pendatang, kelompok etnis Tionghoa acapkali dianggap sebagai orang asing oleh mereka yang menyebut diri orang asli (pribumi). Kelompok etnis Tionghoa dipandang sebagai pendatang baru yang tidak memiliki daerah asal di Indonesia dan tergolong dalam kelompok “ras lain”, serta memeluk agama yang berlainan.⁸ Seiring dengan berjalannya waktu, terjadilah proses asimilasi dengan kelompok pribumi, sehingga memunculkan dua kelompok di kalangan etnis Tionghoa, yaitu *totok* dan peranakan. Namun hal tersebut tidak serta merta menghilangkan anggapan bahwa kedua kelompok ini tetaplah asing. Jurang pemisah antara kelompok Tionghoa dengan kelompok pribumi menjadi semakin lebar, disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial, misalnya sistem opsir (Kapitan Cina), di mana ada seorang Tionghoa yang diberi kuasa oleh pemerintah kolonial untuk mengatur kelompok etnis Tionghoa dalam beberapa urusan, seperti urusan agama, adat istiadat, menyelesaikan pertikaian, bahkan memerintah kelompoknya dalam urusan-urusan sipil.⁹ Kebijakan lain yang

7. Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa: Kasus Indonesia* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2002), 8.

8. Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*, 70.

9. Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*, 74.

diterbitkan oleh pemerintah kolonial adalah kebijakan mengenai sistem pemukiman (*Wijkenstelsel*), di mana kelompok etnis Tionghoa diwajibkan untuk tinggal di daerah tertentu, terpisah dari kelompok pribumi. Pengaturan yang sarat dengan kepentingan politik ini ditetapkan oleh pemerintah kolonial supaya tidak terjalin komunikasi dan upaya membangun kekuatan bersama di antara kelompok Tionghoa dan pribumi, yang disinyalir akan memunculkan potensi bahaya bagi pemerintah kolonial dan kepentingannya.¹⁰ Ada juga kebijakan tentang stratifikasi masyarakat, di mana penduduk Hindia Belanda yang awalnya dibagi berdasarkan agama, yakni: Kristen, Islam, dan non-Kristen,¹¹ pada akhirnya dikelompokkan menurut ras, yakni: orang Eropa (orang Belanda), kelompok pribumi (orang Indonesia yang dijajah oleh pemerintah kolonial), serta mereka yang disamakan dengan orang Eropa, atau yang disebut dengan kelompok Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), yakni: orang Jepang, Arab, dan Tionghoa.¹² Orang Eropa merupakan masyarakat kelas atas, kelompok pribumi dianggap sebagai kelas bawah, dan kelompok Timur Asing sebagai kelas menengah.¹³

Kebijakan dan sistem yang diciptakan oleh pemerintah kolonial, semakin menguatkan anggapan bahwa kelompok etnis Tionghoa sesungguhnya adalah orang asing, yang memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah kolonial. Hal itu telah menimbulkan akibat yang dirasakan pada periode-periode selanjutnya, bahkan hingga masa kini. Setelah Indonesia merdeka, khususnya pada masa pemerintahan

10. Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*, 75.

11. Gouw Giok Siong, *Warga Negara dan Orang Asing*. (Jakarta: Keng Po, 1960), 29.

12. Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*, 77.

13. Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*, 78.

Orde Baru, politik minoritas didengungkan dengan semakin kuat. Kebijakan politik yang diambil pemerintah Orde Baru melarang semua organisasi sosio-politik yang berbau Tionghoa, khususnya dengan kecurigaan bahwa organisasi-organisasi itu berhaluan kiri. Demikian juga dengan pelibatan orang-orang Tionghoa dalam pemerintahan, dibatasi jumlahnya. Bahkan kelompok etnis Tionghoa yang masih menggunakan nama Tionghoa, diwajibkan untuk mengganti nama mereka dengan nama selain nama Tionghoa. Kemudian, dalam dokumen kependudukan, ada perbedaan yang sengaja dilakukan untuk menandai bahwa penduduk yang dimaksud adalah keturunan Tionghoa. Dalam bidang kebudayaan dan pendidikan, pemerintah melarang beroperasinya sekolah-sekolah Tionghoa, dan menggantinya dengan sekolah-sekolah berbahasa Indonesia. Kebudayaan masyarakat Tionghoa, seperti barongsai, dan juga agama minoritas yang justru banyak dipeluk oleh masyarakat Tionghoa, yakni Konghucu, dikeluarkan dari daftar agama resmi yang diakui oleh negara. Jurang pemisah yang tajam, yang telah dibangun sejak zaman pemerintah kolonial, terbentuk menjadi semakin lebar pada masa pemerintahan Orde Baru. Hal ini telah memunculkan permasalahan hubungan antaretnis yang amat kompleks. Sentimen etnis, prasangka, tindakan diskriminatif, serta bentuk-bentuk kekerasan, telah dialami dan menciderai mereka.¹⁴ Istilah “Cina” yang dikenakan kepada kelompok etnis Tionghoa, bukan semata-mata merujuk pada asal usul atau identitas mereka yang datang dari daratan Tiongkok, tetapi lebih

14. Misalnya peristiwa-peristiwa kerusuhan yang terjadi di Indonesia, di mana kelompok etnis Tionghoa beserta properti yang mereka miliki (rumah, toko/kantor) atau yang terkait dengan kelompok Tionghoa (sekolah, kawasan tempat tinggal atau pertokoan milik orang Tionghoa) menjadi sasaran tindak anarkhis massa.

bernuansa *name-calling*,¹⁵ yakni ejekan yang merendahkan, menghina, meremehkan dan penuh dengan kebencian. Kelompok etnis Tionghoa seringkali berada dalam posisi sebagai korban dalam ketegangan hubungan antaretnis yang dilakukan oleh kelompok pribumi. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi, kelompok etnis Tionghoa tidak selamanya berada pada posisi sebagai korban, dan kelompok pribumi pada posisi sebagai pelaku. Keadaan yang sebaliknya bukan saja mungkin terjadi, tetapi telah terjadi. Kelompok etnis Tionghoa juga seringkali terlibat sebagai pelaku yang memunculkan ketegangan hubungan antaretnis Tionghoa-pribumi. Ada prasangka yang dibangun, stereotip yang dipelihara dan diwariskan, tindakan diskriminasi, bahkan sampai kepada perilaku kekerasan, baik secara verbal, fisik, maupun struktural terhadap kelompok pribumi yang ditunjukkan dan dilakukan oleh kelompok etnis Tionghoa. Gejala semacam ini mirip (sekalipun tidak persis sama) dengan apa yang di dalam ilmu psikologi dikenal sebagai *Stockholm Syndrome*.¹⁶ Sikap dan perilaku negatif dalam konteks hubungan antaretnis yang pernah dialami oleh kelompok etnis Tionghoa, kini direproduksi oleh mereka sendiri. Sehingga dalam peristiwa ketegangan relasi antaretnis, kelompok etnis Tionghoa dan kelompok pribumi berada dalam posisi sebagai korban dan sekaligus sebagai pelaku.

15. Istilah *name-calling* menyatakan adanya prasangka, di mana seseorang dipanggil dengan nama atau sebutan yang tidak senonoh, sebagai bentuk penolakan secara lisan. Lihat Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa*, 100.

16. Celia Jameson, "The Short Step From Love to Hypnosis: A Reconsideration of the Stockholm Syndrome", *Journal for Cultural Research* 14 (2010): 337–355, https://id.wikipedia.org/wiki/Sindrom_Stockholm. *Stockholm Syndrome* dipahami sebagai gejala psikologis di mana terjadi ikatan emosional antara korban dengan pelaku kekerasan. Dalam kasus yang lebih ekstrim, korban bahkan mereproduksi apa yang diperbuat oleh pelaku. Intinya, korban berbuat hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh pelaku terhadapnya.

Untuk menelisik fenomena ini dengan lebih jelas dan akurat, maka analisis dengan menggunakan teori Identitas Sosial akan dilakukan. Teori ini pernah dipergunakan untuk menjelaskan peristiwa kekerasan kolektif berskala besar yang terjadi pada masa Perang Dunia II, khususnya dalam peristiwa *Holocaust* yang sangat tragis. Banyak psikolog sosial pada waktu itu melihat peristiwa-peristiwa kekerasan seolah-olah bersumber dari dimensi intrapsikis manusia semata, seperti konflik-konflik psikologis yang tidak terselesaikan akibat pola asuh orang tua yang otoriter.¹⁷ Penjelasan semacam ini dianggap kurang memadai dalam menjelaskan penyebab tindakan kekerasan kolektif yang terjadi dalam skala yang sangat masif. Para psikolog sosial kemudian melakukan pencarian yang lebih menekankan pada faktor-faktor kelompok.¹⁸

Teori Identitas Sosial yang digagas oleh Henri Tajfel merupakan sebuah analisis psikologi sosial mengenai proses pembentukan konsep diri dalam konteks keanggotaan di dalam kelompok, dan proses-proses serta hubungan-hubungan yang terjadi di dalam kelompok. Teori ini berasumsi bahwa perilaku kolektif lebih ditentukan oleh seperangkat nilai, aturan, atribut, atau pola-pola perilaku yang berkembang dan terbagikan secara kolektif dan diadaptasi oleh individu-individu yang ada di dalamnya. Menurut Tajfel, perilaku individu di dalam kelompok tidak lagi ditentukan oleh pilihan bebasnya sebagai pribadi yang berdiri sendiri,

17. M. J. Hornsey, "Social Identity Theory and Self-Categorization Theory," dalam *Social and Personality Psychology Compass* 2/1, sebagaimana dikutip oleh Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 1.

18. Menurut M. A. Hogg, "Social Identity Theory" dalam Peter J. Burke (ed.), *Contemporary Social Psychological Theories*, sebagaimana dikutip oleh Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial*, 2., kelompok dipahami sebagai unit sosial yang lahir dari aktivitas sejumlah individu yang secara sengaja dan kolektif saling berbagi atribut-atribut atau nilai-nilai yang sama dalam rangka membedakan diri mereka dengan individu-individu yang lain.

melainkan muncul dari identifikasi diri dengan kelompok. Dengan kata lain, perilaku individu selalu merupakan cerminan dari perilaku kelompoknya, sehingga dengan demikian identitas sosial dapat dipahami sebagai bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuan¹⁹ dan adaptasinya selama ia berada di dalam kelompok, yang melaluinya ia secara sengaja menginternalisasikan nilai-nilai, turut berpartisipasi, serta mengembangkan rasa peduli dan kebanggaan kepada kelompoknya, sehingga cara dia menampilkan diri di depan orang lain, tidak lagi dapat dilihat sebagai representasi dari personalitasnya semata, melainkan representasi dari identitas kelompoknya.²⁰ Itulah sebabnya solidaritas seorang anggota kelompok terhadap kelompoknya (*ingroup*) menjadi begitu besar, dan sebaliknya seringkali sikap *a priori* ditunjukkan kepada kelompok yang berseberangan (*outgroup*).

Melalui analisis yang dilakukan dengan menggunakan Teori Identitas Sosial, peristiwa di seputar relasi antarkelompok Tionghoa-Pribumi yang diwarnai dengan ketegangan dapat kita pahami dengan lebih jelas. Pengalaman historis telah menyebabkan munculnya sentimen terhadap kelompok etnis Tionghoa yang dilestarikan dari generasi ke generasi karena adanya nilai, sikap, pola perilaku yang terbagikan dan diturunkan kepada seluruh anggota kelompok masyarakat pribumi. Tetapi di sisi lain, tidak mustahil kelompok etnis Tionghoa juga melestarikan dan mewariskan nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku tertentu tentang kelompok pribumi

19. Henri Tajfel dalam tulisannya yang berjudul "Social Categorization" dalam S. Moscovici, ed., *Introduction à la Psychologie Sociale* (Vol. 1, p.272-302), sebagaimana dikutip oleh Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial*, 5., mendefinisikan Identitas Sosial sebagai "the individual's knowledge that belongs to certain social groups together with some emotional and value significance to him of this group membership".

20. Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial*, 5.

(*outgroup*) kepada anggota-anggota kelompoknya, sehingga muncul semacam solidaritas etnis yang terbangun dengan begitu kuat dalam konteks *ingroup*, yang diekspresikan bersamaan dengan sikap *a priori* terhadap kelompok pribumi.

Selain dari catatan mengenai perjalanan kelompok etnis Tionghoa dan perjumpaannya dengan masyarakat lokal di Indonesia, sejarah juga mencatat perjumpaan Ketionghoaan dan Kekristenan, yang menjadi cikal bakal tumbuhnya gereja-gereja Tionghoa di Indonesia. Upaya pemberitaan Injil bukan saja ditujukan kepada orang-orang dari kelompok pribumi, tetapi juga kepada kelompok etnis Tionghoa. Sejalan dengan kemajuan upaya pekabaran Injil di daratan Tiongkok sendiri, yang didukung oleh penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Tionghoa serta kemahiran para pemberita Injil untuk berkomunikasi di dalam bahasa Tionghoa, di Indonesia pun upaya pemberitaan Injil kepada kelompok etnis Tionghoa dilakukan dengan sangat gencar. Badan-badan Pekabaran Injil serta para pekabar Injil berperan amat besar dalam memperjumpakan orang-orang Tionghoa dengan Kekristenan, hingga pada akhirnya berdirilah gereja-gereja Tionghoa di pelbagai wilayah di Indonesia, yang kemudian diwadahi dalam sebuah wadah kesatuan yang disebut Bond Kristen Tionghoa, atau yang dikenal dengan *Bond van Chinese Christenen in Indonesie*.²¹

Gereja Tionghoa merupakan komunitas orang percaya yang memiliki keunikan khusus, di mana anggotanya terdiri dari orang-orang Tionghoa yang kini menjadi Kristen, bahkan memiliki panggilan khusus untuk menjangkau kelompok etnis Tionghoa lainnya agar dapat mendengar dan mengenal Injil. Gereja Tionghoa

21. Chris Hartono, *Ketionghoaan dan Kekristenan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1974), 39.

merupakan sebuah komunitas monokultur (Tionghoa) Kristen yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang multikultur. Itulah sebabnya, dalam keberadaannya yang unik, serta kehadirannya di tengah-tengah konteks yang juga unik, Chris Hartono menyebutkan bahwa panggilan bagi gereja-gereja Tionghoa Indonesia, bukan saja terbatas pada usaha penjangkauan terhadap etnis Tionghoa serta pemurnian iman Kristen dari latarbelakang kepercayaan atau budaya yang sebelumnya dihidupi oleh mereka, namun lebih jauh lagi untuk melaksanakan amanat pengutusan Tuhan, di mana gereja-gereja Tionghoa Indonesia terpanggil untuk menjadi gereja yang terbuka bagi keseluruhan orang dari segala suku, bangsa, bahasa, adat istiadat di Indonesia. Secara tegas, Chris Hartono mengatakan bahwa gereja Tionghoa di Indonesia

“... harus terbuka bagi (semua) orang-orang, (termasuk) anggota-anggota Gereja yang bukan Tionghoa,...harus mencerminkan keseluruhan anggota Tubuh Kristus,...harus memiliki ciri azasinya: **keterbukaan**”²²

Menjadi gereja yang terbuka adalah panggilan bagi gereja Tionghoa Indonesia. Namun panggilan untuk menggereja yang seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Latar belakang historis telah menorehkan catatan-catatan yang penuh dengan ketegangan dalam hubungan antaretnis Tionghoa-pribumi. Kecurigaan, sentimen etnis, sikap dan perlakuan diskriminatif, bahkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh satu kelompok terhadap kelompok yang lain, telah mewarnai hubungan antaretnis Tionghoa-pribumi. Dinamika semacam ini

22. Chris Hartono, *Ketionghoaan dan Kekristenan*, 126-127.

sedikit atau banyak tentunya turut memengaruhi komunitas Kristen (gereja), khususnya gereja Tionghoa di Indonesia dalam perjumpaan dan relasinya dengan kelompok masyarakat pribumi. Sehingga sangat mungkin komunitas gereja Tionghoa pada akhirnya membangun sebuah kelompok yang eksklusif, tertutup bagi orang-orang yang dianggap berbeda, suatu gambaran tentang relasi yang diwarnai dengan ketakutan dan kecurigaan. Bahkan dalam praktik-praktik hidup bergereja, tidak jarang dijumpai kasus di mana pihak yang *notabene* adalah sesama Kristen, seringkali tidak mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama, hanya karena faktor etnisitas yang melekat pada dirinya. Sangat mungkin komunitas gereja Tionghoa bisa jatuh pada kesalahan yang sama, yang pernah dilakukan pihak-pihak lain terhadapnya: membangun kecurigaan (*prejudice*), melestarikan stereotip, menciptakan stigma, berlaku diskriminatif, bahkan melakukan tindak-tanduk kekerasan terhadap kelompok pribumi. Komunitas Kristen Tionghoa perlu untuk menilik kembali identitas serta natur dirinya sebagai sebuah gereja, agar benar-benar mampu menggereja sebagaimana semestinya di Indonesia ini.

Pendidikan Kristen Berwawasan Multikultural

Secara etimologis, istilah “pendidikan” dimaknai sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mentransformasi pemahaman, sikap dan tata laku seseorang dalam upaya mendewasakan manusia, yang dilakukan melalui pengajaran dan pelatihan.²³ Pengertian ini memperlihatkan sisi optimis dari

23. Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 762.

upaya mendidik yang dilakukan secara sadar dan terencana, yakni terjadinya perubahan (transformasi) dalam diri peserta didik, yang terjadi pada semua aspek secara utuh dan menyeluruh menuju kedewasaan. John Dewey, sebagaimana dikutip oleh Randolph C. Miller²⁴ juga mengaitkan upaya mendidik dengan tujuan transformatif, sebagai tujuan akhir yang jelas:

“Education is a constant reorganizing or reconstructing of experience. It has all the time an immediate end, and so far as activity is educative, it reaches that end –the **direct transformation** of the quality of experience”

Transformasi pertama-tama dimaksudkan untuk terjadi *di dalam diri* peserta didik, kemudian *melalui* peserta didik. Demikian juga halnya dengan pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen bukan semata-mata dipahami secara sempit sebagai upaya mendidik yang dilakukan secara Kristen. Pendidikan Kristen bukan sekadar memperkenalkan pokok-pokok ajaran Alkitab, dogma gereja, tokoh-tokoh Alkitab dan informasi-informasi Kristen lainnya yang bersifat kognitif. Merujuk pada pengertian yang dibangun oleh Dewey, pendidikan Kristen berupaya untuk mengorganisasi dan mengonstruksi pengalaman-pengalaman belajar peserta didik untuk tujuan transformatif. Proses mengorganisasi dan mengonstruksi pengalaman belajar peserta didik, dilakukan dengan cara mengaitkannya dengan realitas yang terdapat di dalam kehidupan, dengan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam dunia ini, sehingga melalui proses itu, peserta didik mampu melakukan *self-reflection*, yang kemudian menjadi jalan menuju terjadinya transformasi. Karena itulah Mary Elizabeth Mullino Moore berpendapat bahwa pendidikan pada akhirnya memiliki

24. Randolph C. Miller, *Education for Christian Living* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1963), 40.

empat tujuan:²⁵ (1) memimpin peserta didik untuk mengenal dan turut berpartisipasi di dalam (persoalan atau pergumulan yang terjadi di dalam) dunia; (2) memimpin peserta didik untuk mengalami perjumpaan (*encounter*) dengan dunia serta realitas yang ada di dalamnya; (3) memimpin peserta didik agar memiliki kesadaran dan kepekaan sosial, yang membuat mereka menyadari keberadaan mereka sebagai makhluk sosial yang tidak terpisahkan dari dunia; (4) memimpin peserta didik agar mempertajam visi mereka untuk berkontribusi bagi masa depan dunia ini. Melalui pendidikan, diharapkan terjadi transformasi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Senada dengan pemahaman ini, Jack L. Seymour memberi pengertian mengenai pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen dipahami sebagai sebuah percakapan kehidupan (*conversation for living*), sebuah usaha untuk menggunakan sumber iman dan tradisi kultural dalam menghadirkan masa depan yang adil dan berpengharapan.²⁶ Seymour memahami pendidikan Kristen sebagai sebuah percakapan (*conversation*) tentang kehidupan dan untuk kehidupan. Artinya pendidikan Kristen tidak boleh terlepas dari kehidupan, tidak bisa bersikap acuh pada persoalan-persoalan kehidupan, serta dimaksudkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Sedangkan istilah “multikultural” menunjuk pada suatu gejala yang terjadi dalam sebuah masyarakat yang ditandai dengan hadirnya lebih dari satu kebudayaan. Dari pemaknaan atas kedua istilah itu, maka dibangunlah suatu

25. Mary Elizabeth M. Moore, *Teaching from the Heart, Theology and Educational Method* (Minneapolis: Fortress Press, 1991), 163.

26. Jack L. Seymour, *Memetakan Pendidikan Kristiani: Pendekatan-pendekatan Menuju Pembelajaran Jemaat* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 13.

pengertian tentang apa itu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah sebuah proses mengembangkan pemahaman, sikap dan tata laku seseorang dalam usaha untuk mendewasakan manusia, yang dilakukan melalui pengajaran, pelatihan dan cara-cara mendidik lainnya, agar peserta didik mau dan mampu menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik.²⁷ Pendidikan Kristen berwawasan multikultural yang diberikan kepada komunitas orang percaya (gereja) akan memberi dampak pada gereja, yakni supaya gereja: (1) menyadari, mengakui dan menghargai keragaman dalam komunitas gereja dan dalam masyarakat; (2) bersikap terbuka (inklusif) terhadap realitas keberagaman itu; (3) membangun *mutual understanding* – semangat saling memahami, saling percaya (*mutual trust*), dan mengakui kesetaraan (*equality*) dari faktor-faktor kultural yang berbeda yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian komunitas orang percaya, khususnya gereja Tionghoa di Indonesia, akan menjadi gereja yang terbuka dalam mengakui, menghargai, dan pada akhirnya menerima perbedaan (termasuk perbedaan etnis) dalam hidup menggereja di tengah-tengah konteks Indonesia yang multikultur ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

27. Panmilo Yangin, *Gereja dan Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 14.

1. Realitas keberagaman yang terdapat di dalam kehidupan bangsa Indonesia telah memunculkan permasalahan pelik, khususnya dipicu oleh pengalaman historis masa lalu hingga saat ini. Hal tersebut telah memunculkan dinamika relasi antaretnis yang penuh dengan ketegangan dan diwarnai dengan konflik-konflik horizontal, khususnya antara kelompok etnis Tionghoa dan kelompok pribumi. Gambaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini, sangat mungkin juga terjadi di dalam kehidupan komunitas orang percaya (gereja) Tionghoa di Indonesia. Bagaimana gambaran serta penjelasan deskriptif-empiris mengenai relasi hubungan antaretnis Tionghoa-pribumi sejak masa lalu hingga kini?
2. Ketegangan yang mewarnai relasi antarkelompok Tionghoa-pribumi tidak disebabkan oleh faktor intrapsikis dari pihak-pihak yang terlibat. Dibutuhkan sebuah analisis yang memadai untuk dapat memperjelas fenomena tersebut agar persoalan ini dapat ditelaah dengan benar dan mendapatkan solusi yang tepat. Bagaimana analisis dengan menggunakan Teori Identitas Sosial dapat memperjelas fenomena ketegangan relasi antarkelompok Tionghoa-pribumi di Indonesia?
3. Pendidikan merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mentransformasi diri peserta didik dan realitas kehidupan. Di tengah-tengah kenyataan multikulturalitas masyarakat Indonesia, ketegangan, konflik, dan kekerasan kerap mewarnai kehidupan masyarakat, termasuk masyarakat gereja. Untuk itu dibutuhkan peran pendidikan (khususnya pendidikan Kristen berwawasan multikultural) untuk mencegah, meresolusi

dan mengantisipasi konflik sosial yang terjadi. Dalam konteks hidup bergereja, khususnya di tengah-tengah komunitas gereja Tionghoa, bagaimana pendidikan Kristen berwawasan multikultural dapat memainkan peranannya untuk membingkai ulang pemahaman, sikap, dan praksis hidup bergerja yang benar di tengah-tengah masyarakat multikultur?

4. Cara hidup menggereja (ortopraksis) amat ditentukan dari pemahaman yang tepat dan utuh (ortodoksi) mengenai gereja dan konteksnya. Kesalahan dalam memahami hakekat gereja dan konteks di mana gereja diutus, akan menyebabkan munculnya cara hidup menggereja yang bukan saja tidak relevan, tetapi juga tidak sesuai dengan jati dirinya sebagai gereja. Bagaimana cara hidup menggereja yang semestinya ditunjukkan oleh komunitas gereja Tionghoa yang hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang multikultur ini?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan tesis ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk memberi gambaran serta penjelasan deskriptif-empiris mengenai dinamika yang terjadi dalam relasi antaretnis Tionghoa-pribumi dalam konteks masyarakat serta gereja Tionghoa Indonesia, yang kerap diwarnai dengan ketegangan dan konflik.

2. Untuk menyediakan sebuah penjelasan yang memadai dalam upaya menganalisis persoalan ketegangan relasi antaretnis Tionghoa-pribumi secara lebih jelas dan akurat.
3. Untuk meletakkan sebuah acuan normatif dari perspektif pendidikan Kristen berwawasan multikultural yang diharapkan akan dapat mentransformasi pemahaman, sikap dan tata laku anggota komunitas gereja Tionghoa agar mampu mempraktikkan cara hidup menggereja dengan benar dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultur.
4. Untuk memberikan petunjuk serta langkah praktis kepada komunitas gereja Tionghoa Indonesia agar dapat mempraktikkan cara hidup (praksis) menggereja di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang multikultur.

Manfaat Penelitian

Persoalan relasi antaretnis Tionghoa-pribumi telah menjadi permasalahan pelik yang berlangsung hingga kini dan seringkali menyebabkan terjadinya konflik-konflik horizontal yang amat hebat. Penelitian ini diharapkan akan memberi wawasan serta kesadaran multikultural bagi komunitas gereja (khususnya gereja dengan corak monokultur, seperti gereja Tionghoa), agar komunitas gereja Tionghoa dapat menggereja: bersaksi, bersekutu, dan melayani secara relevan, sesuai dengan natur dirinya sebagai gereja, dan sesuai dengan konteks kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang multikultur. Demikian juga melalui penelitian ini, diharapkan akan dapat membangun kesadaran para pemimpin gereja (Majelis

Jemaat dan rohaniwan), khususnya gereja Tionghoa Indonesia, untuk melakukan tugas pendidikan Kristen yang kontekstual dan relevan bagi anggota jemaat, dengan menekankan wawasan multikultural di dalamnya, agar komunitas gereja dapat menjadi komunitas yang terbuka, yang selalu hadir dalam relasi penerimaan dan kerjasama yang penuh cinta dan damai terhadap semua orang.

Pembatasan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, pembatasan penelitian dilakukan atas hal-hal berikut ini:

1. Komunitas orang percaya (gereja) Tionghoa merujuk pada institusi gereja yang mayoritas anggotanya adalah orang dengan etnis Tionghoa, yang masih menggunakan bahasa Tionghoa sebagai media pelayanan dan komunikasi antar anggota jemaat, serta masih memelihara budaya dan nilai-nilai ketionghoaan dengan cukup kuat.
2. Komunitas orang percaya yang dimaksud, merujuk pada komunitas gereja secara institusional, bukan komunitas orang percaya di rumah (keluarga Kristen) atau di sekolah Kristen, sehingga upaya pendidikan Kristen yang dibahas di dalam penulisan tesis ini, dipahami sebagai pendidikan Kristen bagi anggota jemaat dari gereja Tionghoa.
3. Pemahaman multikultural yang dipergunakan dalam penelitian ini, dibatasi hanya dalam pengertian keberagaman etnis (tidak membahas faktor-faktor

kultural lain, seperti: keragaman agama/keyakinan, keragaman gender, keragaman orientasi seksual, keragaman dalam pandangan politik, dll.).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah riset yang dilakukan di ranah Teologi Praktika, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana Peneliti akan menyusun sebuah deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang sedang diselidiki, kemudian mempelajari masalah-masalah yang ada, lalu mencoba menyorotinya dengan sumber-sumber yang diperoleh dari studi literatur (kepustakaan). Karena itu dalam menerapkan metode penelitian ini, Peneliti mengikuti langkah-langkah penelitian secara kualitatif di ranah Teologi Praktika, sebagaimana digagas oleh Richard R. Osmer dalam buku *“Practical Theology: An Introduction”*²⁸, sebagai berikut:

1. Tahap Deskriptif-Empiris

Peneliti mengumpulkan informasi secara rinci dan lengkap tentang kejadian, situasi dan konteks permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai hal tersebut. Tugas Peneliti di akhir tahap ini adalah mampu mendeskripsikan dan menjawab pertanyaan “Permasalahan apa yang sesungguhnya sedang terjadi?” (*What is going on?*)

28. Richard R. Osmer, *Practical Theology: An Introduction* (Grand Rapids: Eerdmans, 2008), 4.

2. Tahap Interpretatif

Peneliti dalam tahap ini akan menggunakan kajian teoretis yang berasal dari bidang atau disiplin ilmu lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lengkap mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Tugas Peneliti di akhir tahap ini adalah mampu memberi penjelasan yang lebih lengkap atas pertanyaan “Mengapa permasalahan ini bisa terjadi?” (*Why is this going on?*)

3. Tahap Normatif

Peneliti dalam tahap ini mengusung sebuah acuan normatif yang menjadi landasan ideal yang dipergunakan untuk menyoroti, mengkaji, dan mengevaluasi permasalahan yang sedang diteliti, yang kemudian akan memandu langkah di tahap berikutnya. Tugas Peneliti di akhir tahap ini adalah mampu memberi penjelasan mengenai “Apa yang semestinya terjadi?” (*What ought to be going on?*)

4. Tahap Pragmatis

Peneliti dalam tahap ini menawarkan sebuah prinsip dan langkah strategis sebagai respons untuk bergerak menuju kepada apa yang telah dijelaskan di dalam acuan normatif sebagai landasan ideal yang telah ditetapkan. Tugas Peneliti di akhir tahap ini adalah mampu memberi masukan tentang “Bagaimana langkah konkret yang mesti dilakukan dalam merespons keadaan ini?” (*How might we respond?*)

Adapun sumber pustaka yang dapat menjadi referensi dalam penulisan tesis ini terambil dari: buku (cetak dan elektronik), jurnal (cetak dan elektronik), artikel

atau data-data yang dimuat dalam laman *website*, yang terkait dengan topik penulisan.

Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari enam bab. Bab pertama merupakan pendahuluan, di mana di dalamnya dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan, serta kerangka penulisan. Bab kedua merupakan tahap “Deskriptif-Empiris”, di mana di dalamnya akan diuraikan mengenai permasalahan relasi antaretnis Tionghoa-pribumi, baik yang terjadi dalam konteks masyarakat Indonesia, maupun dalam konteks komunitas gereja Tionghoa Indonesia. Bab ketiga merupakan tahap “Interpretatif”, yang akan menyajikan analisis atas permasalahan relasi antaretnis Tionghoa-pribumi, dengan menggunakan Teori Identitas Sosial, untuk memperjelas permasalahan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Bab keempat merupakan tahap “Normatif”, di mana di dalamnya akan dijabarkan konsep pendidikan Kristen berwawasan multikultural, yang akan dipergunakan sebagai acuan normatif bagi praksis menggereja yang benar, yang dapat dilakukan oleh komunitas gereja Tionghoa Indonesia. Bab kelima merupakan tahap “Pragmatis”, di mana di dalamnya akan dibahas mengenai prinsip dan pola hidup menggereja yang semestinya dipraktikkan oleh komunitas gereja Tionghoa Indonesia dalam konteks masyarakat

Indonesia yang multikultur. Dan bab keenam berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan pada tesis ini, saran bagi penelitian selanjutnya, serta refleksi Penulis.